



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1949-1956

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No.5 Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Nurul Husna^{1✉}, Kamilah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nurulhusnaoppo10@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Inventori memegang peran krusial sebagai komponen aset lancar bagi perusahaan perdagangan, industri manufaktur, dan institusi pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan akuntansi terhadap inventori sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Medan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam pengelolaan inventori. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan telah mengimplementasikan perlakuan akuntansi untuk inventori yang selaras dengan PSAP No. 5. Perlakuan ini mencakup pengakuan inventori saat terdapat potensi manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diukur secara andal dan ketika terjadi perpindahan hak kepemilikan atau pengendalian. Penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik akuntansi inventori yang sesuai standar dan menegaskan pentingnya penerapan standar akuntansi yang tepat dalam sektor publik.

Kata Kunci: *Akuntansi Persediaan PSAP No.5, Dinas Kesehatan*

Abstract

Inventory plays a crucial role as a component of current assets for trading companies, manufacturing industries, and government institutions. This study aims to examine the accounting treatment of inventory in accordance with Government Accounting Standard (PSAP) No. 5, specifically at the Medan City Health Department. Employing a qualitative descriptive approach, this research highlights the importance of compliance with accounting standards in inventory management. Findings from this study indicate that the Medan City Health Department has implemented accounting treatment for inventory that aligns with PSAP No. 5. This treatment includes the recognition of inventory when there is a reliable measurable future economic benefit and when a transfer of ownership or control occurs. This research provides insights into the proper standard accounting practices for inventory and underscores the significance of applying accurate accounting standards in the public sector.

Keywords: PSAP Inventory Accounting No.5, Health Service

PENDAHULUAN

Reformasi yang menjadi kebutuhan di semua tingkatan masyarakat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu tema utama reformasi adalah desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (Al-Barbasy, dkk., 2020). Hal ini berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Daerah. Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan signifikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama yang terkait dengan aktivitas kota dan negara, adalah melalui penggunaan standar akuntansi negara. Saat ini, pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Marwanto, dkk., 2014). Dalam Basis Akuntansi Akrual Dalam SAP, pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas dicatat, dan laporan mengenai ketentuan keuangan serta pendapatan, biaya, dan beban dipublikasikan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan standar yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Purwanti, 2018).

Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan suatu entitas dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan Keputusan Akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang digunakan oleh lembaga pemerintah (Satria dan Ade, 2020). Menurut Abdul Halim, pengertian akuntansi pemerintahan adalah suatu kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan informasi kuantitatif, terutama informasi yang bersifat

keuangan, oleh instansi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ketertarikan pada berbagai tindakan alternatif.

Definisi Persediaan (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Republik Indonesia Tahun 2010) Persediaan mencakup barang atau peralatan yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan dijual dan/atau disediakan kepada pemerintah dalam kaitannya dengan layanan. Aset berwujud ini harus dilaporkan. PSAP No.05 tentang Akuntansi Persediaan menetapkan bahwa standar ini berlaku ketika semua persediaan ditampilkan dalam laporan keuangan umum yang disiapkan dan disajikan berdasarkan basis kas untuk mencatat aset, kewajiban, dan pos ekuitas. Standar ini berlaku untuk semua entitas pemerintah pusat dan daerah, kecuali perusahaan negara/daerah. Ruang Lingkup Persediaan Jika Anda ingin menampilkan seluruh persediaan dalam laporan keuangan umum, terapkan PSAP 5 untuk persediaan.

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual akan dijalankan secara bertingkat. Untuk pemerintah pusat, implementasi ini diatur melalui regulasi dari Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah, kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, diharuskan bahwa SAP dengan basis akrual sesuai dengan lampiran I harus diterapkan selambat-lambatnya dalam regulasi yang dikeluarkan tahun 2014. Akan tetapi, implementasi SAP berbasis kas sesuai dengan lampiran II hanya berlaku sampai dengan tahun 2014. Lampiran II SAP dapat beralih ke basis akrual. Rumah Sakit, sebagai bagian dari organisasi sektor publik yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat, merupakan contoh penting dalam penyelenggaraan layanan publik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sektor publik, penting untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah, yang pada gilirannya mendukung pemerintah dalam mempertahankan fokus terhadap tujuan dan targetnya.

Dinas Kesehatan Kota Medan menjalankan proses inventarisasi yang mencakup berbagai barang atau peralatan yang telah dibeli dan disimpan untuk digunakan, meliputi barang-barang yang cepat habis seperti alat tulis kantor, barang yang tahan lama seperti komponen peralatan dan pipa, serta barang bekas pakai. Inventori berperan sebagai tulang punggung bagi perusahaan dagang, produsen, organisasi bisnis, termasuk juga lembaga pemerintah, dan dikategorikan sebagai aset likuid. Persediaan berfungsi mendukung kegiatan layanan, pembelian, dan penjualan, menjadi sangat vital untuk aset likuid perusahaan. Ketersediaan barang-barang ini sangat krusial bagi pemerintah daerah, termasuk dalam menyediakan layanan kesehatan di Kota Medan. Di penghujung periode, apabila terdapat ketidaksesuaian antara catatan persediaan dengan jumlah persediaan

secara fisik, maka penyesuaian dilakukan agar catatan akuntansi mencerminkan kondisi fisik yang sebenarnya. Mengingat pentingnya pengelolaan persediaan farmasi dalam sektor publik, penerapan standar akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan layanan masyarakat dan penggunaan sistem akuntansi akrual menjadi penting. Kondisi ini mendorong penulis untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi persediaan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, yang menginspirasi penulisan penelitian dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No.5 di Dinas Kesehatan Kota Medan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam serta merangkum berbagai fenomena, situasi, dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Melalui pendekatan deskriptif, berbagai kondisi serta situasi yang muncul akan dijelaskan secara terperinci. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Kota Medan, seperti laporan realisasi anggaran, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dan situasi akan dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang komprehensif, dibandingkan dengan teori yang relevan, dan kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian umum dari Standar Akuntansi Pemerintahan No.5 menggambarkan persediaan sebagai aset dengan bentuk sebagai berikut:

1. Barang atau perlengkapan (perbekalan) yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan.
2. Bahan atau peralatan (consumables) yang digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses pembuatan untuk dijual atau dipindahtangankan kepada masyarakat umum.
4. Barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau dipindahtangankan kepada masyarakat umum sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, mengungkapkan bahwa "*dikantor ini persediaannya dikategorikan dalam dua jenis yaitu*":

Tabel I. Persediaan Barang Di Kantor Dinas Kesehatan Medan

Nama Barang	Jumlah	Harga
Obat-Obatan	33.781.298,00	39.046.675.833,15
Alat Tulis Kantor	94.141,00	642.521.642,00

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian "Aset" wawancara, Dinas Kesehatan Kota Medan merencanakan anggaran inventaris berdasarkan kebutuhan inventaris pada tahun berikutnya. Mereka melakukan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan data pasien setiap tahun dan membuat estimasi untuk memproyeksikan kebutuhan obat pada tahun berikutnya. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Persediaan, ketika pemerintah membeli barang untuk keperluan penimbunan strategis, barang tersebut akan dicatat sebagai persediaan sebagai tindakan pencegahan. Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan tertarik pada obat-obatan dan perlengkapan kantor (ATK). Mereka juga melakukan estimasi persediaan untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga seperti bencana alam dan menganggap persediaan obat sebagai bagian dari persediaan. Oleh karena itu, dalam hal pengklasifikasian aset inventaris, Dinas Kesehatan Kota Medan mematuhi peraturan inventarisasi yang tercantum dalam PSAP 05.

Menurut uraian standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan mengungkapkan hal-hal berikut:

Prinsip Akuntansi Pengukuran Persediaan, Penjelasan rinci mengenai persediaan, seperti barang dan peralatan yang digunakan dalam pelayanan publik, barang dan peralatan yang digunakan dalam produksi, proses yang digunakan, dijual atau disediakan untuk umum. Jenis, jumlah, dan nilai barang yang disimpan dan barang yang masih dalam proses pembuatan dan dimaksudkan untuk dijual atau ditawarkan kepada umum, serta persediaan dalam keadaan rusak.

Dinas Kesehatan Kota Medan melaporkan inventarisasi bulanan dalam laporan keuangan, khususnya dalam bagian "Aset". Sesuai dengan PSAP 05 tentang persediaan, biaya penyimpanan direkam sebagai konsumsi penyimpanan dan dihitung sebagai bagian dari penyampaian laporan operasional. Pernyataan ini sejalan dengan laporan Dinas Kesehatan Kota Medan yang mencatat bahwa biaya persediaan juga tercakup dalam laporan operasional.

Berdasarkan temuan tersebut, analisis penerapan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Medan mencakup aset berupa barang atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Konsisten dengan PSAP 05 Persediaan, aset tersebut meliputi:

- Barang atau Peralatan yang Digunakan dalam Kegiatan Operasional Negara

- Bahan atau peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan (persediaan)
- Produk yang sedang dalam proses produksi untuk dijual atau dipindahtangankan kepada masyarakat.
- Barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau dialihkan kepada umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas Kesehatan Kota Medan akan mengakui pengiriman obat setelah barang diterima secara fisik, beserta kelengkapan dokumentasinya. Hal ini sesuai dengan PSAP No.5 bahwa persediaan diakui:

- Ketika manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh pemerintah di masa depan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.
- Pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan/atau pengendalian dialihkan.

Peralatan Dinas Kesehatan Kota Medan dicatat sebagai biaya perolehan. Pasokan disediakan melalui pembelian. PSAP selesai karena Dinas Kesehatan Kota Medan memberikan rinciannya dalam katalog elektronik (e-purchase) yaitu :

1. Harga perolehan bila pengadaannya melalui pembelian
2. Biaya produksi bila pengadaannya melalui produksi sendiri
3. Harga pasar bila pengadaannya melalui cara lain seperti sumbangan atau penyitaan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 5 menegaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan:

1. Prinsip Akuntansi Pengukuran Persediaan, dengan penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan. Ini mencakup barang atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan kota, dalam proses produksi, dimiliki untuk dijual atau ditawarkan kepada umum, serta barang yang tidak digunakan dalam produksi untuk dijual atau digunakan, dan dimaksudkan untuk diserahkan kepada pemerintah kota.
2. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam keadaan rusak. Pengungkapan inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dianggap sesuai karena detail inventarisasi tersebut dijabarkan dalam catatan laporan keuangan.

Biaya yang tercatat didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan Persediaan (PSAP) 05, di mana perhitungan biaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyampaian laporan operasional. Pencatatan inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan termasuk dalam laporan operasional, sehingga konsisten dengan PSAP.

SIMPULAN

Pelaksanaan pencatatan barang di Dinas Kesehatan Kota Medan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Barang Provinsi 05. Proses pengendalian persediaan di instansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang-barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan yang diajukan, sesuai dengan penjabaran Standar Akuntansi Pemerintahan 05 mengenai persediaan. Ini menggambarkan bahwa persediaan dianggap sebagai aset di mana pemerintah memperoleh manfaat ekonomi di masa depan, dengan nilai atau biaya yang dapat dihitung secara akurat, dan dicatat saat barang diterima, kepemilikan atau pengendalian atas barang tersebut dipindahtangankan.

Pengukuran barang di Dinas Kesehatan Kota Medan sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah berdasarkan PSAP No.5. Untuk studi lanjutan, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan 05 terkait persediaan, untuk memahami pencatatan akuntansi akrual yang selaras dengan SAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamila, K., Sitepu, L. E. B., Ramadani, A. P., Reksa, M. A., & Faradilla, P. (2023). *Peran Kantor Jasa Akuntan Dalam Peningkatan Kualitas Informasi BLUD Puskesmas*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 469-479.
- Montolalu, C., Runtu, T., & Mawikere, L. M. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas Di Kantor Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(3), 588-598.
- Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(2).
- Widiyaningrum, W. Y., & Agustian, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Oleh Dinas Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Pangalengan Dtp Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*. JISIPOL. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(3).
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1).

- Al-Barbasy, M. M., R. WD. Tuti, dan Djoni G. (2020). *Reformasi Sistem Politik Untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi*. Jurnal Politik Indonesia dan Global. 1(2), 75-86.
- Marwanto Harjowiryono, dkk. (2014). *Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis AkruaI pada Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat, Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, Jakarta, 29.
- Purwanti Lilik. (2018). *Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Membawa Berkah?*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL. 9(1), 172-191.
- Satria, M. Rizal, Ade P. Fatmawati. (2020). *Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet (Pada Pd Beras Padaringan)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan. 3(2), 320-337.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.